

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1998
TENTANG
PROSEDUR PENGUSULAN, PENETAPAN DAN EVALUASI ORGANISASI
PEMERINTAHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa untuk menciptakan tertib organisasi pemerintahan dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden mengenai prosedur pengusulan, penetapan, dan evaluasi organisasi pemerintahan sebagai penyempurnaan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1998.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Para Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Untuk :

PERTAMA :

Setiap usulan mengenai penataan organisasi pemerintahan dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan organisasi di lingkungannya masing-masing.

KEDUA :

Penataan organisasi pemerintahan ditetapkan dengan :

- a. Keputusan Presiden atas usul Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural Eselon I.
- b. Keputusan Menteri/Jaksa Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, sepanjang menyangkut jabatan struktural Eselon II ke bawah.

KETIGA :

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden ini dengan menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan serta mengadakan evaluasi kinerja organisasi pemerintahan sekurang-kurangnya setiap tahun.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO